

ABSTRAK

Tesis ini menganalisis klientelisme dalam jaringan korupsi kepala daerah di dalam pengelolaan sektor sumber daya alam di Indonesia. Klientelisme dalam jaringan korupsi menekankan pada pertukaran manfaat dan dukungan politik antara aktor yang memiliki kekuasaan (*patron*) dan aktor yang membutuhkan perlindungan atau layanan (*client*). Proses penanganan korupsi sejauh ini hanya berfokus pada pelaku utama yang secara langsung terlibat. Padahal, praktik korupsi selalu membentuk jaringan yang kompleks, relasi klientelistik, dan melibatkan banyak aktor di luar aktor utama. Dengan mengkaji kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di sektor sumber daya alam antara tahun 2014 hingga 2019, saya berargumen bahwa kepala daerah memang menjadi aktor sentral dalam jaringan korupsi, namun keberadaan birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan kepala daerah tidaklah kalah penting. Bekerjanya birokrasi sebagai mesin politik bagi kepala daerah telah memfasilitasi klientelisme dalam jaringan korupsi.

Hasil penelitian dalam tesis ini mendukung argumen tersebut yang menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan aktor kunci dalam jaringan korupsi di sektor ekstraktif yang berperan ganda tidak hanya menghubungkan antar aktor, namun sekaligus memperkuat hubungan yang terbentuk. Sedangkan, birokrasi memerankan peran sebagai mediator atau perantara dalam proses aliran informasi dan interaksi dalam jaringan korupsi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mantan tim pemenang kepala daerah dalam Pilkada, dalam beberapa kasus menunjukkan hubungan yang bersifat personal dengan terlibat dalam jaringan korupsi pascapilkada. Dalam hampir semua kasus, jaringan korupsi yang terbentuk cenderung memiliki tingkat kohesi yang moderat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jaringan terdapat beragam kekuatan hubungan antar aktor, jaringan yang cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan, namun masih rentan terhadap intervensi atau penyelidikan.

Melalui studi jaringan sosial, saya menghasilkan peta dan menganalisis relasi antara orang-orang atau organisasi, yang sangat efektif dalam membongkar rangkaian korupsi yang biasanya terselubung dan kompleks. Ini berguna dalam menemukan individu atau entitas kunci serta perantara dalam jaringan korupsi, yang biasanya memegang peran vital dalam menjalankan kegiatan koruptif. Selain itu, analisis ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang struktur



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Klientelisme dalam Jaringan Korupsi Kepala Daerah di Sektor Sumber Daya Alam
Wegik Prasetyo, clientelism, corruption, regional heads, natural resources, social network analysis
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

dari jaringan korupsi, mencakup identifikasi posisi sentral dalam jaringan dan bagaimana aliran uang atau informasi berlangsung di dalamnya.

ABSTRACT

This thesis analyzes clientelism within the corruption network of regional heads in the management of the natural resource sector in Indonesia. Clientelism in the corruption network emphasizes the exchange of benefits and political support between actors with power (patrons) and actors who need protection or services (clients). The process of handling corruption so far has only focused on the main actors directly involved. However, corrupt practices always form a complex network, clientelistic relationships, and involve many actors beyond the main ones. By examining corruption cases involving local leaders in the natural resource sector between 2014 and 2019, I argue that regional heads are indeed central actors in the corruption network, but the existence of bureaucracy implementing regional heads policies is equally important. The bureaucracy's operation as a political machine for regional heads has facilitated clientelism within the corruption network.

The results of this research support the argument that regional heads are key actors in the corruption network of the extractive sector, playing a dual role not only in connecting actors but also in strengthening the relationships formed. Meanwhile, the bureaucracy plays the role of mediator or intermediary in the process of information flow and interaction within the corruption network. Additionally, the research results also show that the former campaign team of regional heads in local elections, in some cases, show a personal relationship by being involved in the post-election corruption network. In almost all cases, the formed corruption networks tend to have a moderate level of cohesion. This indicates that within the network there are various relationship strengths among actors, a network that is flexible enough to adapt to changes, yet still vulnerable to intervention or investigation.

Through social network analysis, I produce maps and analyze relations between people or organizations, which is very effective in uncovering corruption schemes that are usually hidden and complex. This is useful in finding key individuals or entities as well as intermediaries in the corruption network, who typically play a vital role in carrying out corrupt activities. Moreover, this analysis provides a deeper insight into the structure of the corruption network, including the identification of central positions in the network and how the flow of money or information occurs within it.